

**ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

*ANALYSIS OF PERFORMANCE IN THE EXPENDITURE BUDGET REALIZATION REPORT ON THE
DEPARTEMENT OF REVENUE FINANCE AND ASSET MANAGEMENT OF REGENCY OF
SANGIHE ISLAND*

Oleh:
Grace Yunita Liando¹
Ingriani Elim²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : ¹graceglarita@gmail.com
²inggriani_elim@yahoo.com

Abstrak : Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah merupakan analisis atas hasil kerja dari belanja daerah Pemerintahan Kabupaten (PemKab) Kepulauan Sangihe dalam LRA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu belanja pada LRA untuk T.A 2011-2014 menunjukkan bahwa kinerja belanja PemKab Kepulauan Sangihe dinilai baik dan terus melakukan perbaikan setiap tahun dalam pemanfaatan realisasi belanja. Pertumbuhan belanja mulai terlihat pada T.A 2013 dan 2014 dibandingkan dengan T.A 2011 dan 2012. Sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya PemKab Kepulauan Sangihe sebaiknya mengalokasikan belanja daerah dalam porsi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta Pimpinan DPPKAD sebaiknya meninjau lebih jauh manfaat serta pengalokasian belanja daerah sehingga dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja di masa yang akan datang.

Kata kunci: *analisis kinerja, belanja, laporan realisasi anggaran*

Abstract : *Shopping is all expenditures from the account of the Regional Treasury which reduces equity funds in the current budget period of the year in question which will not obtain payment back by local governments. Analysis of Performance in the Expenditure Budget Realization Report in the Revenue Department of Finance and Asset Management Sangihe Islands Regency is an analysis of the work of local government expenditure Regency Sangihe Islands in the Expenditure Budget Realization Report. The method used in this research is descriptive analysis. The results of this study are shopping on the Expenditure Budget Realization Report to FY 2011-2014 show that the performance of the district administration Sangihe rated good and continue to improve every year in the utilization of expenditure. Spending growth began to look at the FY 2013 and FY 2014 as compared to 2011 and 2012. It is expected that in the next year should be allocated Sangihe regency shopping areas in equal proportion according to the needs of regional development and public welfare and Revenue Department of Finance and Asset Management Sangihe Islands Regency Leaders should further review the benefits and allocating shopping areas so as to improve the effectiveness, productivity and efficiency of spending in the future.*

Keywords: *performance analysis, expenditure, budget realization report*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan Negara maka perlu dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan Negara dapat berjalan dengan baik.

Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi akan dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai.

Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan menghasilkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Dengan ini diharapkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai. Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:11) adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan yang baik. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada bulan Oktober tahun 2010. Peraturan pemerintah tentang SAP berbasis akrual ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak diluar eksekutif.

Upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelolaan keuangan Negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 tentang perbendaharaan menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca LRA menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca, laporan operasional serta laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu, LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dinilai paling utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang ada yaitu untuk mengetahui kinerja belanja dalam LRA pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Tahun Anggaran (TA) 2012-2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan (Halim, 2012: 3). Akuntansi sektor publik adalah sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departement –departement dibawahnya (Wiratna, 2015:1). Dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi lembaga-lembaga tinggi Negara.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Halim (2012:5) menyebutkan karakteristik akuntansi sektor publik sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak berorientasi laba.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional
5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca.

Dibandingkan dengan organisasi lain, menurut Siregar (1998 :61) organisasi sektor publik memiliki karakteristik unik yaitu:

1. Motif mencari laba bukan merupakan orientasi utama. Karena orientasi utama adalah peningkatan mutu layanan ,sehingga laba bukan merupakan orientasi utama yang ingin dicapai sehingga tidak diadakan penghitungan dan pelaporan laba.
2. Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, dan kepemilikan tidak dibuktikan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Karena segala yang bersifat pribadi tidak ditemui dalam organisasi sektor publik.
3. Sumber keuangan yang diberikan warga negara tidak secara langsung berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya warga negara membayar pajak kepada pemerintah, warga negara tersebut tidak secara langsung memperoleh layanann dari pemerintah.

Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Soetjipto (2011:61) menyatakan secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik diuraikan sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi
4. Kelangsungan Organisasi
5. Hubungan Masyarakat
6. Sumber Fakta dan Gambaran

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Penyusunan laporan keuangan harus dihasilkan melalui suatu sistem dan prosedur yang lazim. Di dalam Pasal 6, PP 8/2006 dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintahan dihasilkan dari suatu sistem akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Terdapat dua komponen laporan keuangan yang dihasilkan secara langsung dari sistem (proses) akuntansi yaitu neraca dan laporan operasional (LO) atau laporan realisasi anggaran (LRA). LAK (laporan arus kas), LPE, LP SAL, dihasilkan melalui analisis dari neraca, LO dan LRA sedangkan CaLK tidak dapat dihasilkan secara langsung (otomatis) dari sistem (proses) akuntansi, karena informasi di dalam CaLK bersifat kuantitatif/keuangan maupun kualitatif/deskriptif. Bahkan informasi dalam CaLK juga mencakup informasi non-akuntansi dan bisa dilengkapi dengan berbagai macam tabel maupun grafik yang dianggap relevan. Suatu sistem akuntansi pemerintahan setidaknya-tidaknya mengatur mengenai format laporan keuangan, kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, bagan akun standar, jurnal standar, entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dokumen transaksi yang digunakan. Penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) tersebut harus mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan (Halim, 2013: 43). Sistem Akuntansi keuangan daerah menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Renyowijoyo (2011: 77) menjelaskan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditor, dan donator, analisis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pelaksanaan lebih lanjut pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan daerah yang ditetapkan oleh masing-masing daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Laporan Realisasi Anggaran

Standar Akuntansi Pemerintahan (2010: 70) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan

diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Kinerja

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian, karena organisasi dapat menetapkan *reward&punishment*. Tujuan sistem pengukuran kinerja yaitu untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, menyeimbangkan ukuran kinerja finansial & non-finansial, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan dibawah, serta memotivasi pencapaian *goal congruence*, alat mencapai kepuasan individu maupun kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & Punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan memastikan bahwa pengambilan dilakukan secara objektif (Palilingan, 2015).

Penelitian Terdahulu

Palilingan (2015) dengan judul Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Tujuan dari ini penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Analisis Kinerja Belanja dalam LRA pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja pendapatan dan pembiayaan pada Dinas Pendapatan Kota Manado sudah baik.

Makka (2015) dengan judul Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kinerja belanja dalam LRA pada Dinas PPKAD Kota Kotamobagu. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja belanja pada Dinas PPKAD Kota Kotamobagu dinilai sudah baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Data adalah keterangan atau sumber informasi mengenai objek yang akan diteliti dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis data sebagai berikut.

1. Data Kualitatif, data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian berupa penjelasan-penjelasan secara tertulis dan lisan dari sumber- sumber yang terkait dalam penelitian.
2. Data Kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk angka-angka, berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap satu tahun anggaran.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang dalam skripsi ini mengambil Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana penulis melakukan penelitian langsung di objek penelitian dengan mengambil data berupa Laporan Realisasi Anggaran dan juga didukung dengan literatur-literatur yang relevan dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data dan informasi yang berkenan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Pendahuluan
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
3. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menguraikan hasil analisis dari belanja serta bagaimana kinerjanya terhadap LRA. Adapun metode analisis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan alat analisis berikut (Sugiyono, 2011: 67)

Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1} \times 100\%$$

Analisis Belanja Operasional Terhadap Total Belanja Daerah

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Rasio belanja operasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja operasional Terhadap Belanja Daerah} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Pengklasifikasian belanja modal adalah klasifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati atas belanja tersebut. Rasio belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standart baku untuk rasio ini. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan judul skripsi
2. Memperoleh gambaran dari objek penelitian secara keseluruhan dan serta mengetahui permasalahan yang ada.
3. Mengelola data yang diperoleh dan membahas hasil data yang diolah.

4. Menarik kesimpulan dari hasil data yang diolah dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam permasalahan yang ada.

Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional yang akan dibahas atau dianalisis dalam penelitian ini, agar ada batasan atau ruang lingkup yang dibahas lebih terarah sehingga sesuai dengan judul yang diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
2. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
3. Laporan Realisasi Anggaran adalah merupakan laporan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.
4. Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah merupakan analisis atas hasil kerja dari belanja daerah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan alat analisis berupa rasio-rasio keuangan untuk mengukur kinerja belanja tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Visi: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan yang Bersih Profesional, Akuntabilitas, serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai sumber pendapatan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Misi:

1. Menata Administrasi Keuangan yang Efisien dan Efektif
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Profesionalisme Aparatur
3. Menerapkan system Manajemen melalui peningkatan profesionalisme
4. Menggali semua Sumber Potensi Daerah yang dapat dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengushakan penetapan secara adil dan transparan
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah

Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan unsur pendukung Tugas bupati sebagai Pelaksana Otonomi Daerah dalam menyelenggarakan sebagian unsur rumah tangga Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dipimpin seorang kepala dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Dalam perkembangannya Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami beberapa perubahan struktur organisasi yang diatur dalam perubahan Peraturan Daerah. Perubahan struktur organisasi selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana struktur organisasi Dinas PPKAD adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris
3. Bidang Akuntansi
4. Bidang Aset
5. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak
6. Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggalan
7. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Hasil Penelitian**Analisis Varians Belanja**

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Tahun anggaran 2012 menunjukkan anggaran sebesar Rp 573.918.744.933 dan realisasi belanja sebesar Rp 453.897.826.339 atau 79,09% sehingga ini menimbulkan selisih sebesar Rp 120.020.918.594 atau 20,91% yang tidak terealisasi dari total APBD. Jumlah anggaran yang tidak terealisasi dilihat dari persentasenya cukup besar dan nominalnya yang cukup signifikan. Dalam melakukan analisis varians anggaran, hendaknya memperhatikan penghematan yang dilakukan berdasarkan angka presentasi, tetapi juga jumlah nominalnya.

Untuk tahun anggaran 2013, selisih anggaran belanja dan realisasinya menunjukkan adanya efisiensi atau penghematan belanja sebesar Rp 46.572.740.100,54 atau sebesar 7,22% dari total APBD. Dengan demikian untuk tahun anggaran 2013 kinerja belanja pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai baik. Pada tahun anggaran 2014 pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan kinerja yang juga baik. Dimana terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi yang bersaldo negatif yaitu sebesar Rp 57.988.487.394,45 atau sebesar 7,41% dari APBD.

Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah

Analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah merupakan perbandingan antara belanja operasi dengan total belanja. Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Tabel 1 menunjukkan analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah sebagai berikut.

Tabel 1. Analisis Total Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi (Rp) [a]	Total Belanja (Rp) [b]	Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja (%) [a/b x 100%]
2011	397,196,386,514	493,603,806,252	80.47
2012	374,754,293,160	453,897,826,339	82.56
2013	494,385,392,317	598,076,222,875	82.66
2014	575,662,265,766	724,955,782,221	79.41

Sumber : DPPKAD, Kab. Kepulauan Sangihe, 2015 (Data Olahan)

Analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yaitu untuk tahun 2011 sebesar 80,47%, tahun 2012 sebesar 82,56%, tahun 2013 sebesar 82,66% dan tahun 2014 sebesar 79,41%. Dari analisis rasio ini terlihat bahwa pada tahun 2014 total belanja meningkat pesat namun total belanja operasi tidak meningkat secara signifikan sehingga rasio belanja langsung mengalami penurunan sebesar 3% dibanding tahun 2012 dan 2013 yang dinilai stabil.

Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal yang disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Total Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Rp) [a]	Total Belanja (Rp) [b]	Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja (%) [a/b x 100%]
2011	95,738,510,838	493,603,806,252	19.40
2012	74,120,037,245	453,897,826,339	16.33
2013	103,534,535,558	598,076,222,875	17.31
2014	148,439,824,619	724,955,782,221	20.48

Sumber : DPPKAD, Kab. Kepulauan Sangihe, 2015 (Data Olahan)

Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah dari tahun anggaran 2011 sampai dengan 2014 yaitu untuk tahun 2011 sebesar 19,40%, tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 16,33% selanjutnya tahun 2013 mengalami kenaikan berkisar 1% menjadi 17,31% dan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 3% menjadi 20,48%. Dengan demikian terlihat bahwa dengan besaran total belanja modal berbanding lurus dengan total belanja daerah.

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan rasio efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

Tabel 3. Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011-2014

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja (Rp) [c]	Realisasi Belanja (Rp) [d]	Rasio Efisiensi Belanja (%) [d/c x 100%]
2011	530,662,602,987	493,603,806,252	93.02
2012	573,918,744,933	453,897,826,339	79.09
2013	644,648,962,975	598,076,222,875	92.78
2014	782,944,269,615	724,955,782,221	92.59

Sumber : DPPKAD, Kab. Kepulauan Sangihe, 2015 (Data Olahan)

Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja, maka dapat dilihat mulai dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat melakukan penghematan anggaran. Penghematan anggaran terbesar untuk kurun waktu tahun terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 20,91% dibandingkan dengan tahun 2011, 2013 dan 2014 yang penghematan anggarannya terlihat stabil.

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2011-2014 menggunakan analisis varians belanja menunjukkan hasil bahwa kinerja belanja dinilai baik dan pemerintahan terus melakukan perbaikan dalam pemanfaatan realisasi belanja dimana Tahun anggaran 2012 terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp 120.020.918.594 atau 20,91%, tahun anggaran 2013, selisih anggaran belanja dan realisasinya menunjukkan adanya efisiensi atau penghematan belanja sebesar Rp 46.572.740.100,54 atau sebesar 7,22% dan tahun anggaran 2014 selisih anggaran belanja dengan realisasi yang bersaldo negatif yaitu sebesar Rp 57.988.487.394,45 atau sebesar 7,41% dari total APBD.

Hasil analisis pertumbuhan belanja untuk tahun anggaran 2012 mengalami penurunan sebesar Rp 39.705.979.913 atau -8,04% dibanding realisasi belanja tahun 2011. Pertumbuhan belanja untuk tahun anggaran 2013 dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp

144,178,396,536 atau 31.76%. Untuk Tahun anggaran 2014 menunjukkan kenaikan realisasi belanja sebesar 21% atau Rp 126,879,559,346 dibanding tahun anggaran 2013.

Analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yaitu untuk tahun 2011 sebesar 80,47%, tahun 2012 sebesar 82,56%, tahun 2013 sebesar 82,66% dan tahun 2014 sebesar 79,41%. Dari analisis rasio ini terlihat bahwa pada tahun 2014 total belanja meningkat pesat namun total belanja operasi tidak meningkat secara signifikan sehingga rasio belanja langsung mengalami penurunan sebesar 3% dibanding tahun 2012 dan 2013 yang dinilai stabil. Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah dari tahun anggaran 2011 sampai dengan 2014 yaitu untuk tahun 2011 sebesar 19,40%, tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 16,33% selanjutnya tahun 2013 mengalami kenaikan berkisar 1% menjadi 17,31% dan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 3% menjadi 20,48%.

Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat melakukan penghematan anggaran. Penghematan anggaran terbesar untuk kurun waktu 4 tahun (TA 2011-TA 2014) terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 20,91% dibandingkan dengan tahun 2011, 2013 dan 2014 yang penghematan anggarannya terlihat stabil. Peningkatan pertumbuhan belanja disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk setiap tahunnya dan juga dipengaruhi oleh besarnya inflasi.

Palilingan (2015:17) Dari analisis secara umum kinerja pemerintah Kota Manado dapat dikatakan baik karena dari tahun 2009 – 2013 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2009-2013 yaitu sebesar 92,57 %, 94,25 %, 94,03 %, 93,43 %, 79,50 %. Realisasi belanja daerah yang paling rendah terjadi tahun 2013. Apabila seluruh kegiatan yang direncanakan telah terlaksana, ini menunjukkan telah terjadinya pengendalian anggaran yang ketat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Manado, maka hal ini merupakan suatu prestasi bagi Kota Manado.

Makka (2015:14) Pemerintahan Kota Kotamobagu, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran T.A 2013 sampai T.A 2014 masing-masing adalah sebagai berikut: T.A 2013 realisasi belanja sebesar 87.26% dan T.A 2014 sebesar 85.40% dari yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan adanya kinerja belanja daerah yang baik yaitu dengan adanya efisiensi belanja untuk tahun anggaran 2013 sebesar 12.73% dan tahun anggaran 2014 sebesar 14.60%. Secara umum seluruh komponen belanja, baik belanja operasi maupun belanja modal menunjukkan kinerja yang baik, dimana terdapat efisiensi yang memadai terlebih lagi untuk tahun anggaran 2013. Pada tabel 4.5 menunjukkan presentase belanja operasional lebih besar dari total belanja daerah dibandingkan dengan belanja modal. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Kotamobagu lebih memprioritaskan dananya pada belanja operasi dibandingkan belanja modal.

Dari hasil analisis keserasian diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagian besar membelanjakan anggarannya lebih besar untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal. 79% belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi dan sisanya 17% untuk belanja modal. Namun pada tahun 2014 belanja modal meningkat menjadi 20,48% dan belanja operasi mengalami penurunan menjadi 79.41%. Selisih perbandingan belanja operasi dengan belanja modal ini cukup besar sehingga perlunya perhatian dari pemerintah kabupaten kepulauan sangihe untuk mengoptimalkan belanja modal secara efektif dan lebih efisien dalam rangka pembangunan daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan analisis variansi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2011-2014 menunjukkan bahwa kinerja belanja Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai baik dan terus melakukan perbaikan setiap tahun dalam pemanfaatan realisasi belanja.
2. Pertumbuhan belanja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai terlihat pada Tahun Anggaran 2013 dan Tahun anggaran 2014 dibandingkan dengan tahun anggaran 2011 dan 2012
3. Analisis keserasian untuk belanja operasi terhadap total belanja daerah dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 menunjukkan total belanja yang meningkat pesat namun total belanja operasi

- tidak meningkat secara signifikan sehingga rasio belanja langsung mengalami penurunan dibanding tahun 2012 dan 2013 yang dinilai stabil.
4. Analisis keserasian untuk belanja modal terhadap total belanja daerah dari tahun anggaran 2011 sampai dengan 2014 mengalami kenaikan mulai tahun 2013 berbanding terbalik dengan belanja modal pada tahun 2012 yang menurun dari tahun 2011
 5. Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat melakukan penghematan anggaran yang terlihat stabil. Peningkatan pertumbuhan belanja ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk setiap tahunnya dan juga dipengaruhi oleh besarnya inflasi.
 6. Analisis keserasian secara keseluruhan menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagian besar membelanjakan anggarannya untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Bagi Dinas PPKAD secara khusus dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe agar semakin memperhatikan kinerja dalam pengelolaan belanja daerah dari APBD yang diterima.
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebaiknya mengalokasikan belanja daerah dalam porsi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
3. Dinas PPKAD diharapkan meninjau secara lebih jauh pemanfaatan serta pengalokasian belanja daerah yang lebih banyak dialokasikan pada belanja operasi dibanding belanja modal sehingga dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja yang semakin baik di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik; Teori, Konsep & Aplikasi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press, Jakarta.
- Makka, Harry. 2015. Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, <http://www.unsrat.ac.id> . Diakses tanggal 1 April 2016. Hal. 332-333.
- Palilingan, Anastasia. 2015. Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, <http://www.unsrat.ac.id> . Diakses tanggal 1 April 2016. Hal. 17-24.
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Renyowijoyo, Maindro. 2011. *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Nonlaba*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia.2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia.2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, . Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, . Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Soetjipto, Kery. Prawoto, Sudi. 2011. *Akuntansi Pemerintahan RI Reformasi Keuangan Negara*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Suwanda, Dadang. Nasution, R. Dailibas. 2015. *Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. ROSDA. Jakarta.
- Siregar, Baldric, Siregar, Bonni. 1998. *Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.